

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dituntut agar dapat melakukan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas untuk membangun negara atau daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Salah satu sumber daya yang terpenting yang harus dikelola dengan baik adalah keuangan. Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka pengelolaan keuangan daerah seutuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memuat informasi akuntansi yang berkualitas agar dapat digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Agar terwujudnya informasi akuntansi yang berkualitas, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang diperlukan. Menurut Hariadi, dkk, (2013:125), keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami,

Menurut Andri Juhara selaku Akuntan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sukabumi dalam penelitian Anggraeni (2017), sering

terjadinya keterlambatan penyerahan laporan keuangan di tingkat SKPD yang menyebabkan harus bekerja lebih ekstra pada saat laporan keuangan harus diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat, hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat kualitatif laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan harus relevan diantaranya memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan lengkap.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini dari hasil pemeriksaan BPK tersebut diantaranya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut menyajikan dan mengungkapkan laporannya dengan wajar dan berkualitas. BPK menilai LKPD dengan empat opini yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pemerintah Kota Sukabumi sudah dua kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun DPRD setempat melihat masih banyak sektor yang perlu dibenahi berdasarkan hasil temuan BPK. Menurut Faisal Anwar selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, dari dua kali kita mendapatkan predikat WTP, tetap saja persoalan aset belum bisa terselesaikan. Hasil dari sidak yang dilakukan yaitu masih terdapat beberapa OPD yang tidak memiliki data aset yang valid sehingga pegawai inventarisasi aset kesulitan dalam melakukan inventarisasi aset. (*Sumber: <https://sukabumiekspres.com/Senin-27-Februari-2017>*).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, lengkap, dan wajar yang juga merupakan suatu gambaran dari pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang baik, dibutuhkan pengelola keuangan yang berkompoten dalam bidang keuangan. Kompetensi pengelola keuangan dapat terlihat dari tingkat pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan pengelola keuangan maka akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengetahuannya. Kompetensi pengelola keuangan daerah juga seharusnya ditunjang dengan latar belakang pendidikan akuntansi, berpengalaman dalam bidang akuntansi, dan sering mengikuti pelatihan atau pendidikan akuntansi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Menurut Moehariono (2012:6), kompetensi merupakan karakteristik dasar yang terdiri dari: keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributs*).

Menurut Udiyanti, dkk, dalam jurnal penelitian (2014), dalam menyusun laporan keuangan diperlukan kompetensi yang baik dari staf akuntansi. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Menurut Warisno, dalam jurnal penelitian Setyowati, dkk (2016), SDM yang berkompoten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, Tahria Syafrudin menilai, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Iwa Kaniwa selaku Asisten VI Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (*Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/Kamis-29-Desember-2011>*).

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia khususnya pengelola keuangan daerah sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Karena pengelola keuangan daerah yang berkompeten akan menunjang berjalannya kegiatan pemerintah daerah dengan baik, khususnya dalam hal keuangan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Suwanda, Dadang dan Hendri (2015:37), “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.” SAP berguna bagi pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan untuk menentukan informasi apa saja yang harus disajikan pada pihak luar.

Menurut Hasanah, Nuramalia dan Achmad (2017:28), SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik dipemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemda dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Menurut Udiyanti, dkk, dalam jurnal penelitian (2014), dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Ketua Tim Senior BPK RI Provinsi Jatim, Winarno mengatakan bahwa hasil penilaian kesiapan pemda menuju basis akrual, menunjukkan pemda belum sepenuhnya siap dalam menyusun LKPD berbasis akrual yang dapat berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan tahun 2015. Pada tahun 2010 masih dilakukan secara bertahap, yakni basis kas menuju akrual. Tapi pada penyajian laporan keuangan pada tahun 2015 ini harus sudah menerapkan akrual. (*Sumber: <http://www.beritajatim.com/Senin-07-Desember-2015>*).

Oleh sebab itu, dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah ini dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Dalam jurnal penelitian Udiyanti, dkk (2014) dengan judul, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan

Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng)”. Menunjukkan hasil penelitian bahwa, 1) standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 4) standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam jurnal penelitian Nugroho (2016), dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014)”. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis H1 sampai H3 dapat diterima kebenarannya.

Dalam jurnal penelitian Nugraeni dan M Budiantara (2015), dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dan

implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu yang penulis uraikan tersebut, maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat menarik untuk peneliti kaji lebih jauh. Karena, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya dibuat oleh pengelola keuangan daerah yang berkompeten di bidang keuangan atau berpendidikan akuntansi dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku agar dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan oleh pengguna informasi. Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik menulis penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masih terdapat laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Pengelolaan aset di Kota Sukabumi masih belum bisa terselesaikan.
3. Lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena minimnya SDM yang berlatar belakang akuntansi dan auditor di Jawa Barat.
4. Masih terdapat pemda yang belum sepenuhnya siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercakup dalam PP No. 71 Tahun 2010.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah kompetensi pengelola keuangan daerah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pengelola keuangan daerah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sehingga memberikan dampak tercapainya suatu penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

- a. Bagi penulis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang kompetensi pengelola keuangan daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Bagi pihak-pihak lain (peneliti selanjutnya), dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menjadi tolok ukur pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Bagi pengelola keuangan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan agar para pegawai dapat lebih termotivasi untuk dapat mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan banyak mengikuti pelatihan akuntansi untuk meningkatkan kompetensi tentang pelaporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah dalam karya nyata.